

Menjaga Harmoni dengan Mengelola Keberagaman Agama dan Budaya sebagai Identitas Nasional Indonesia

Amira Jasmine Salsabila Darajat¹, Anang Puji Utama², Panji Suwarno³, Arifuddin Uksan⁴,
Rachmat Setiawibawa⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pertahanan Republik Indonesia

E-mail : amira.darajat@gmail.com

Article History:

Received: 06 Februari 2026

Revised: 24 Maret 2026

Accepted: 07 April 2026

Keywords: Keberagaman Agama, Budaya, Identitas Nasional, Moderasi Agama, Multikulturalisme.

Abstract: Keberagaman agama dan budaya di Indonesia merupakan bagian dari kekuatan utama pembentuk identitas nasional bangsa. Seiring dengan globalisasi dan era yang semakin maju, tantangan dalam menjaga harmoni keberagaman di tengah masyarakat semakin besar. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep keberagaman agama dan budaya yang dijaga dan dikelola sebagai kekuatan nasional Indonesia. Menggunakan teori identitas nasional, moderasi agama, dan multikulturalisme, serta metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data dari studi literatur, hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas nasional Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan semboyan persatuan Bhinneka Tunggal Ika memainkan peran penting dalam memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Moderasi agama dianggap sebagai pendekatan yang efektif meredam ekstremisme agama dan mendorong toleransi, sementara multikulturalisme memberikan fondasi untuk merayakan perbedaan dan menjaga kesatuan bangsa. Menghadapi tantangan globalisasi, pengelolaan keberagaman harus diperkuat melalui pendidikan multikultural, kebijakan inklusif, dan sinergi antar lembaga. Dengan begitu, Indonesia dapat senantiasa menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat identitas nasionalnya.

PENDAHULUAN

Indonesia, negara dengan kekayaan agama dan budaya yang unik sehingga menjadi bagian integral dari identitas nasional bangsa. Meski terlihat sebagai dua hal yang berbeda, penelitian Chusniyah dan Pitaloka (2016) memperlihatkan bagaimana agama dan budaya saling berkesinambungan; umat beragama antusias untuk terlibat dalam multikulturalisme dan globalisasi. Dengan berpondasi pada nilai-nilai Pancasila, seperti prinsip toleransi, persatuan, dan keadilan, warga negara Indonesia dibimbing untuk menjaga persatuan dalam keberagaman. Hal ini sejalan dengan konsep persatuan Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*) yang mencerminkan

semangat persatuan terlepas perbedaan yang hadir di antara masyarakat, menjadikan keberagaman sebagai kekuatan dalam membangun bangsa.

Keberagaman yang dimiliki Indonesia bersinergi membentuk identitas nasional yang unik, namun juga menjadi potensi ancaman jika tidak dikelola dengan bijak. Dalam era globalisasi yang terus berkembang, tantangan untuk mempertahankan keharmonisan sosial semakin besar. Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi yang tumbuh pesat menjadi faktor yang memberikan dampak signifikan. Terlepas dari banyaknya kemudahan yang diberikan dalam mengakses informasi, kemajuan ini juga menjadi salah satu pemicu penyebaran paham-paham radikal yang berpotensi merusak integrasi sosial di Indonesia (Khaswara, 2022). Narasi yang memprovokasi pemecahbelahan bangsa seperti Intoleransi agama, radikalisme, dan terorisme dapat dengan cepat beredar melalui kanal digital dan masif mempengaruhi pengguna media sosial (Nuha et al., 2024). Apabila tidak disaring, baik oleh kebijakan pemerintah maupun kecermatan setiap individu, narasi negatif ini dapat menjadi pemicu *echo chamber* di masyarakat.

Dalam konteks sosial saat ini, dinamika perubahan dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia sangat dipengaruhi oleh bagaimana keragaman ini dikelola dan dipahami. Pendekatan moderasi agama menjadi penting untuk meredam ekstremisme dan mengedepankan sikap inklusif dalam kehidupan beragama. Moderasi beragama menawarkan solusi dalam menjaga harmoni dengan berprinsip teguh pada toleransi, penerimaan perbedaan, dan penolakan segala bentuk kekerasan dalam beragama (Nadhifah et al., 2024). Selain itu, teori identitas nasional dapat juga berperan penting dalam membentuk rasa kebanggaan terhadap negara. Identitas nasional Indonesia yang tercermin dalam keberagaman budaya dan agama perlu senantiasa dijaga agar tidak terkikis sebab arus globalisasi. Kekayaan budaya dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan berfungsi sebagai simbol kesatuan yang mengikat masyarakat dari berbagai latar belakang etnis dan agama (Pasha, 2021). Hal ini sejalan dengan hakikat multikulturalisme yang membela pluralisme dan keberagaman budaya. Multikulturalisme melindungi karakteristik dan kontribusi unik berbagai kelompok budaya dan minoritas (Johansson, 2024). Karenanya, pengelolaan keberagaman melalui pendidikan multikultural dan kebijakan inklusif menjadi kunci dalam memperkuat identitas nasional Indonesia menghadapi tantangan zaman.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini berupaya menganalisis bagaimana keberagaman agama dan budaya dapat dijaga dan dikelola sebagai kekuatan nasional Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis yang efektif dan berkelanjutan dalam menjaga dan merawat identitas nasional yang kokoh di tengah perubahan zaman.

LANDASAN TEORI

Dalam mengkaji pengelolaan keberagaman agama dan budaya sebagai kekuatan nasional Indonesia, artikel ini merujuk pada Teori Identitas Nasional sebagai teori umum dan tujuan akhir pembahasan artikel, didukung dengan Teori Moderasi Agama dan Teori Multikulturalisme sebagai dua pilar pengokoh teori utama.

William Bloom (1990) melihat identitas nasional bukan terutama sebagai warisan budaya atau etnis, melainkan sebagai proses psikologis-politik yang dibentuk melalui mekanisme identifikasi antara individu dan negara, bukan semata-mata dengan etnis, agama, atau budaya asalnya. Fokusnya terleta pada bagaimana identitas nasional terbentuk sebagai konstruksi sosial melalui proses psikologis dan sosiologis, mencakup dimensi kognitif, afektif, dan behavioral. Identitas nasional menjadi kuat ketika negara berhasil menciptakan loyalitas emosional kolektif melalui simbol, institusi, dan narasi bersama. Dalam hal ini, Bloom menganalisis terbentuknya identitas nasional melalui tiga mekanisme utama; 1) simbol negara, seperti bendera, lagu

kebangsaan, bahasa nasional, lambang negara, dan ritual kenegaraan yang membangun keterikatan emosional; 2) institusi negara, seperti sekolah, militer, hukum, dan birokrasi yang berfungsi sebagai alat sosialisasi identitas nasional; dan 3) narasi politik, seperti sejarah nasional, musuh bersama, dan tujuan kolektif membentuk kesadaran kebangsaan yang melekat pada setiap individu. Fungsi dari identitas nasional sendiri dibentuk untuk menjaga stabilitas politik, mendorong loyalitas masyarakat, mengurangi konflik internal, dan memperkuat legitimasi sebuah negara. Teori Bloom digunakan sebagai grand theory atau kerangka induk yang menjelaskan identitas nasional sebagai proses identifikasi politik-afektif. Ini berarti Indonesia sebagai negara berperan membangun loyalitas lintas identitas primordial. Hal ini selaras dengan kondisi yang ada di Indonesia di mana identitas nasionalnya tidak berbasis etnis maupun agama semata. Peran Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika justru adalah sebagai simbol pemersatu.

Pokok pikiran Will Kymlicka berbicara tentang merayakan multikulturalisme. Ia menyatakan bahwa negara harus mengakui perbedaan budaya, seberapa padat dan kompleksnya hal itu pada suatu negara, bukan menghapusnya. Multikulturalisme berbicara tentang beragam latar belakang dan kondisi masyarakat yang tinggal hidup di suatu wilayah yang sama, namun kesetaraan masyarakat tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap individu (Kymlicka, 1995). Contohnya, pada kondisi minoritas, budaya tersebut berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam kerangka negara. Teori ini kompatibel dengan Indonesia, karena mengakui adat, budaya daerah, dan bahasa lokal dengan tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teori ini mencakup keseimbangan antara *unity* dan *diversity*, serta pentingnya kebijakan publik yang inklusif seperti pendidikan multikultural dan perlindungan hak minoritas. Selain itu, teori ini mengisi kekosongan normatif dalam teori Bloom. Kymlicka menjelaskan keadilan pengakuan budaya dan menolak adanya asimilasi paksa. Hal ini penting untuk menghadirkan budaya lokal yang tidak melemahkan entitas negara dan sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Kamali (2015) menjelaskan bahwa watiyyah atau moderasi beragama adalah prinsip Qur'ani yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan penolakan ekstremisme. Moderasi bukan relativisme, melainkan posisi normatif yang menjaga kohesi sosial. Moderasi ini memungkinkan agama menjadi pendukung loyalitas nasional, bukan pesaingnya. Kamali menguraikan empat dimensi fundamental moderasi beragama; 1) pemahaman kontekstual; 2) toleransi; 3) penolakan kekerasan; dan 4) keterbukaan dialog. Ini menjelaskan bagaimana konsep wasatiyyah dapat diterapkan dalam konteks keberagaman agama di Indonesia. Fungsi konsep ini adalah memberikan landasan etnis-keagamaan. Moderasi beragama menjelaskan agama sebagai kekuatan pemersatu dan bukan jadi pemecah, sehingga ekstremisme dan eksklusivisme tidak dibenarkan. Moderasi beragama cocok digunakan sebagai pisau analisis, mengingat sila pertama dari Pancasila yang berarti Indonesia merupakan negara yang menjunjung ketuhanan, tetapi bukan negara berlandaskan agama tertentu. Teori dan konsep ini saling melengkapi dalam memberikan kerangka analisis yang holistik untuk memahami pengelolaan keberagaman di Indonesia. Teori Bloom menjelaskan bagaimana identitas nasional dibangun, teori Kymlicka menjelaskan bagaimana keberagaman budaya diakui secara adil, dan konsep Kamali menjelaskan bagaimana keberagaman agama dikelola secara etis dan moderat. Dengan menggunakan studi literatur sebagai metode penelitian, artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Indonesia mengelola keberagaman agama dan budaya, serta bagaimana keberagaman tersebut berkontribusi pada identitas nasional yang kuat dan harmonis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan mengukur fenomena secara kuantitatif, melainkan memahami, menafsirkan, dan menganalisis konsep-konsep teoritis mengenai identitas nasional, multikulturalisme, dan moderasi beragama dalam konteks Indonesia sebagai negara yang majemuk secara agama dan budaya (Creswell, 2014).

Metode studi pustaka digunakan dengan melakukan telaah berbagai sumber tulisan seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi yang relevan dengan teori identitas nasional, teori multikulturalisme, konsep moderasi beragama dalam konteks Indonesia (Zed, 2019). Sumber utama penelitian ini adalah William Bloom, Will Kymlicka, dan M. Hashim Kamali.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, di mana peneliti melakukan deskripsi secara sistematis pokok-pokok pemikiran teori dan konsep yang digunakan (Sugiyono, 2017). Kemudian peneliti menganalisis relevansinya dalam menjelaskan keragaman agama dan budaya sebagai identitas nasional Indonesia. Adapun penelitian ini tidak menguji hipotesis, melainkan membangun argumentasi konseptual melalui penafsiran kritis terhadap gagasan teoritis yang ada.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengkaji teks-teks akademik yang relevan (Bowen, 2009). Dokumen yang dianalisis meliputi buku teori, artikel jurnal, serta dokumen kebijakan yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian.

Analisis konseptual-komparatif digunakan untuk mengidentifikasi pokok pemikiran dari teori dan konsep yang akan digunakan (Sartori, 1970). Lalu, dilakukan perbandingan fokus, asumsi dasar, dan peran masing-masing teori-konsep dalam menjelaskan keragaman agama dan budaya. Akhirnya, melakukan sintesis teoritis untuk merumuskan kerangka konseptual terpadu yang menjelaskan bagaimana keragaman agama dan budaya dapat berfungsi sebagai pilar identitas nasional Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan analisis isi kualitatif terhadap teks-teks teori dan dokumen kebijakan dengan menelusuri tema-tema utama (Schreier, 2012). Hasil analisis akan diinterpretasikan secara kontekstual dengan realitas sosial dan ideologis Indonesia, terutama nilai-nilai Pancasila dan semboyan persatuan Bhinneka Tunggal Ika.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman teoritis yang komprehensif dan argumentatif mengenai relevansi integrasi teori identitas nasional, teori multikulturalisme, dan konsep moderasi beragama dalam memperkuat identitas nasional Indonesia yang inklusif dan kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberagaman Agama dan Budaya sebagai Pilar Identitas Nasional Indonesia

Keanekaragaman agama dan budaya di Indonesia merupakan dua pilar utama dalam pembentukan identitas nasional. Indonesia telah lama merawat keberagaman dalam semangat persatuan sejak lama, bahkan ketika kemerdekaan negara ini belum digaungkan. Sebagai negara dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan enam agama resmi, Indonesia telah mengintegrasikan keanekaragaman ini ke dalam ideologi negara, yaitu melalui Pancasila, yang mengakui keberadaan pluralisme agama dan budaya. Selain itu, kebebasan dan keamanan keberagaman tercantum dalam butir-butir pasal UUD NRI 1945. Tertulis bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa, sehingga negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1), (2)). Adapun setiap orang yang secara sah merupakan warga negara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa melihat latar belakang suku, ras, agama, maupun antargolongan (UUD NRI 1945, Pasal 28D ayat (1)). Negara menjamin eksistensi keberagaman agama dan budaya, selama keduanya menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia (UUD NRI 1945, Pasal 27 ayat (1)).

Dalam sejarah panjang Indonesia, agama menjadi dasar kepercayaan individu dan membentuk struktur sosial-budaya yang kuat. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan jelas mencerminkan prinsip agama dalam sila pertama, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya sekadar negara dengan banyak agama, tetapi juga negara yang mengakui dan menghormati perbedaan agama sebagai bagian dari identitas nasional yang khas. Pentingnya agama dalam membentuk identitas nasional Indonesia terlihat dalam berbagai kebijakan yang berusaha mengakomodasi kepentingan semua agama—perayaan hari-hari besar keagamaan diakui secara resmi oleh negara dan umat beragama diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Selain sila pertama, Pancasila memuat 4 butir nilai yang bermakna lainnya. Sila kedua menitikberatkan pentingnya perlakuan yang adil dan beradab sehingga masyarakat perlu berperan aktif dalam mengadvokasi hak asasi manusia dan keadilan sosial. Sila ketiga mengupayakan rasa persatuan dalam rangka menguatkan identitas nasional dan rasa kebersamaan. Sila keempat mengajak masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas dalam hal kesadaran hak-kewajiban agar partisipasinya aktif dan bijaksana. Terakhir, sila kelima menempatkan keadilan (dan bukan pukul rata) pada setiap kebijakan dan tindakan baik oleh otoritas maupun individu demi kesejahteraan bersama (Rafly et al, 2025).

Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa dengan berbagai bahasa, adat istiadat, dan tradisi. Adat istiadat yang berbeda di setiap daerah, mulai dari upacara pernikahan, kelahiran, hingga kematian, memperlihatkan nilai-nilai yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat setempat. Keberagaman budaya ini bukan hanya merupakan sumber kekayaan, tetapi juga menjadi fondasi yang menguatkan persatuan bangsa karena memberikan identitas yang kuat bagi setiap suku dan kelompok masyarakat di Indonesia, serta membangun karakter bangsa. Budaya juga memiliki fungsi sebagai pengikat yang menghubungkan masyarakat Indonesia dengan sejarah panjang perjuangan bangsa. Dari tradisi perlawanan terhadap penjajah hingga semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, budaya Indonesia mengajarkan nilai-nilai kolektivitas, solidaritas, dan nasionalisme.

Selama lebih dari 80 tahun Indonesia telah hidup berdampingan dengan keberagaman. Jika dipikirkan lebih jauh, apabila warga negara Indonesia memilih untuk hidup berdampingan dan bertetangga dengan sesama warga dengan kepercayaan dan jalan hidup yang sama, tentu bisa dipertimbangkan, mengingat bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang mendengarkan suara rakyatnya. Namun, mereka tidak memilih jalan yang mudah tersebut—mereka memilih jalan yang benar dan tepat, yaitu menjunjung tinggi hak-kewajiban yang sama sebagai sesama warga negara; setara di mata hukum negara dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, keragaman agama dan budaya di Indonesia bukan hanya sumber kekayaan, tetapi juga landasan yang memperkuat identitas nasional, sesuai dengan motto Bhinneka Tunggal Ika, yang mencerminkan persatuan dalam keragaman.

Tantangan dan Peluang dalam Pengelolaan Keberagaman

Keragaman agama dan budaya merupakan kekuatan besar bagi Indonesia sekaligus menjadi sumber ancaman jika tidak dikelola dengan bijaksana. Ketika perbedaan dipandang sebagai sesuatu yang memisahkan, maka ancaman terhadap persatuan nasional muncul. Mengelola keragaman di

Indonesia menghadapi berbagai tantangan besar, terutama yang berkaitan dengan konflik sosial yang dipicu oleh perbedaan agama, etnis, atau ideologi. Konflik sektarian dan kekerasan berbasis agama atau etnis yang terjadi di beberapa daerah, seperti pertikaian antar kelompok agama, diskriminasi kelompok minoritas agama-budaya, bahkan radikalisasi agama. Pada dasarnya setiap agama memiliki sisi eksklusif (aqidah dan ibadah) dan inklusif (sikap sosial bermasyarakat) yang mempengaruhi sikap beragama seseorang (Hasan, 2013). Meskipun secara teoritis kedua sisi ini positif, eksklusifitas beragama dapat dinilai mengecilkan nilai dan value orang lain jika tidak diiringi dengan inklusivitas yang cukup. Hal ini menjadi peringatan bahwa ketegangan sosial dalam beragama dapat terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Fenomena radikalisme yang merajalela, terutama di kalangan generasi muda, semakin mengancam harmoni sosial. Penyebaran ide-ide ekstremis, baik secara ideologis maupun dalam praktik keagamaan, telah meningkat secara pesat, terutama melalui media sosial (Khaswara, 2022). Krisis identitas nasional dapat dilihat dari fenomena sosial yang terjadi pada generasi muda, seperti kenakalan remaja, perkelahian antar siswa, narkoba, pergaulan bebas, kejahatan, dan radikalisme (Susmayati et al., 2023). Meningkatnya ideologi radikal yang menyebar melalui media sosial, pendidikan, dan kelompok tertentu telah menimbulkan ketegangan di masyarakat yang beragam. Radikalisasi tidak hanya terjadi dalam konteks agama, tetapi juga dapat diperparah oleh ketidakpuasan sosial dan politik yang dirasakan oleh kelompok-kelompok tertentu (Cilliers, 2019). Radikalisasi ini dapat mendorong individu atau kelompok untuk menolak prinsip-prinsip inklusivitas dan toleransi yang tertanam dalam budaya Indonesia, serta menciptakan atmosfer ketidakpercayaan antara kelompok-kelompok yang berbeda.

Selain itu, tantangan dalam mengelola keragaman juga mencakup potensi segregasi sosial dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Meskipun Indonesia telah lama merawat keberagaman, konflik sektarian di daerah Maluku dan Poso dipicu oleh ketegangan antar kelompok agama dan etnis. Contoh-contoh nyata dalam linimasa sejarah Indonesia menunjukkan bagaimana perbedaan identitas dapat memicu kekerasan sosial. Dalam konteks ini, konflik agama dan etnis tidak hanya berakar pada perbedaan keyakinan atau budaya, tetapi juga dipengaruhi oleh ketidaksetaraan ekonomi dan politik. Ketidaksetaraan sosial-ekonomi seringkali menjadi salah satu faktor yang memicu ketegangan antara kelompok, memperburuk potensi konflik (Robinson, 2020). Ketegangan ini semakin diperparah oleh ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, yang seringkali menciptakan perpecahan antara kelompok etnis atau agama tertentu.

Di Indonesia, meskipun terdapat jaminan konstitusional tentang kebebasan beragama dan berbudaya, kelompok minoritas sering menghadapi diskriminasi dan marginalisasi di berbagai sektor kehidupan. Diskriminasi ini tidak hanya terjadi dalam konteks agama, tetapi juga menyentuh aspek budaya dan etnis. Misalnya, kelompok etnis Tionghoa dan kelompok agama seperti Ahmadiyah dan Syiah sering menghadapi stigma sosial yang kuat. Stereotip negatif terhadap kelompok-kelompok ini diperparah oleh kesalahpahaman publik dan ketidakmampuan lembaga-lembaga untuk menangani kebencian agama dan etnis (Chandra, 2022).

Globalisasi dan kemajuan teknologi telah mengubah dinamika sosial di Indonesia. Hadirnya media sosial mempercepat penyebaran informasi, namun juga menjadi tantangan yang semakin relevan. Globalisasi memicu individualisme, hedonisme, dan materialisme, yang akan mengikis rasa persatuan dan integritas bangsa (Alfiana & Najicha, 2022). Misalnya, kemajuan teknologi dan digitalisasi memudahkan penyebaran informasi secara cepat, namun juga memfasilitasi penyebaran kebencian, intoleransi, dan diskriminasi antar kelompok. Globalisasi telah mengubah cara kita memandang identitas budaya dan agama, dengan pengaruh budaya asing yang semakin kuat melemahkan nilai-nilai tradisional (Kurniawati, 2021). Ketika budaya asing

memasuki ruang publik, Indonesia harus siap dengan adanya kemungkinan tentang berkurang hingga kehilangan budaya asli suatu daerah, terkikisnya nilai-nilai budaya lokal, menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme, sampai dengan hilangnya rasa kekeluargaan dan gotong royong (Aprianti et al., 2022). Mereka seringkali membawa norma-norma yang dapat bertentangan dengan tradisi lokal dan nilai-nilai Pancasila, menciptakan ketegangan dalam masyarakat yang sudah beragam.

Tantangan-tantangan ini menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai saksi bisu dan pasif terhadap ketidakadilan yang menodai makna sejati semboyan itu sendiri, dan berbagai aktor turut berkontribusi dalam melemahnya motto persatuan Indonesia (Zakirah, 2021). Pengelolaan keberagaman agama dan budaya di Indonesia memerlukan pendekatan pemerintah serta peran aktif masyarakat dalam menjaga toleransi dan kepemilikan bersama.

Moderasi Agama dan Multikulturalisme sebagai Solusi dalam Mengelola Keberagaman sebagai Penguatan Identitas Nasional

Bersama dengan anugerah keberagaman yang mengantarkan kepada gerbang kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan seiring dengan berkembangnya zaman. Pergeseran perspektif hingga kemajuan teknologi menjadi ujian nyata bagaimana negara kokoh menjaga identitasnya. Namun, di balik tantangan-tantangan ini terdapat peluang besar untuk memperkuat identitas nasional melalui pendidikan multikultural dan kebijakan inklusif. Multikulturalisme dapat memperkuat persatuan nasional dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis (Khaswara, 2022).

Salah satu contoh yang berhasil adalah Bali, yang dikenal dengan pengelolaan toleransi agama dan budaya yang sangat baik. Mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu yang dikenal sebagai sumber pembentukan identitas religio-kultural utama masyarakat Bali dan tetap berhasil menjaga keharmonisan sosial meskipun berada dalam masyarakat yang beragam dan plural (Sabarudin & Arif, 2019). Salah satu kunci keberhasilannya adalah komitmen bersama antara tokoh agama, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk saling menghargai perbedaan. Selain itu, pemerintah daerah secara aktif mendukung keberagaman melalui kebijakan yang memberikan kebebasan kepada setiap kelompok agama untuk merayakan hari-hari besar keagamaan mereka. Kemudian, faktor paling penting adalah *awareness* atau kesadaran masyarakat tentang menjaga kerukunan antaragama. Di Kota Denpasar, strategi untuk meningkatkan kesadaran ini menggunakan beberapa pendekatan. Diawali dengan pendekatan budaya dengan mengubah pola pikir umat beragama dengan pembinaan nilai, norma, hingga pengetahuan yang berfungsi mengembangkan kerukunan beragama serta menginstitusionalisasikan simpul-simpul kerukunan hingga tingkat terkecil. Prosesnya perlu melibatkan agen pendidikan, masyarakat sipil, dan kebijakan politik. Merealisasikan institusionalisasi perlu menyertakan dialog kognitif dan sosial baik secara formal, informal, maupun non-formal. Perubahan pola pikir ini tidak hanya ditujukan kepada setiap individu, tetapi juga pola pikir kolektif, termasuk juga memasukkan nilai-nilai kebijaksanaan lokal Bali (Kiriana et al., 2024). Melalui studi kasus ini, masyarakat dapat belajar dari *framework* yang serupa untuk diadaptasi menyesuaikan lokasi tinggal dan budaya setempat.

Multikulturalisme harus ditanamkan sedini mungkin. Saat ini, sudah banyak sekali model pendidikan multikultural yang bisa diimplementasikan dengan berbagai tujuan; untuk menghormati dan menghargai keragaman budaya; untuk mempromosikan pemahaman tentang warisan budaya dan etnis yang unik; untuk mendorong pengembangan kurikulum yang responsif dan mencerminkan tanggung jawab dalam hal budaya; untuk memfasilitasi perolehan sikap, keterampilan, dan pengetahuan untuk dapat berjalan dalam keberagaman budaya; untuk menghilangkan rasisme dan diskriminasi dalam masyarakat, dan; untuk mencapai kesejahteraan

sosial, politik, ekonomi, dan juga pendidikan (Hyttten, 2017). Generasi muda perlu mengamini setiap butir nilai Pancasila sebagai warga negara yang cemerlang. Lingkungan formal perlu memberikan dukungan dan pembinaan konstruktif untuk membentuk para pelajar Indonesia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, memahami keragaman global. Mampu bekerjasama dalam gotong royong, kreatif inovatif, mampu berpikir kritis, dan memiliki kemandirian (Astuti, 2023). Hal ini perlu didukung oleh lingkungan non formal seperti lingkungan rumah tinggal, di mana generasi yang lebih senior membimbing keseharian generasi muda dengan konsisten. Murid SD dianggap sudah mampu berkomunikasi, sehingga mereka dapat secara sadar membiasakan diri untuk menghargai dan menghormati perbedaan di lingkungan mereka selama jam sekolah maupun di luar jam sekolah (Varelaswi, 2023). Nilai-nilai kehidupan meliputi toleransi, keadilan, keterbukaan, kearifan lokal, cinta tanah air, dan kemanusiaan secara global tidak seharusnya lekang oleh waktu. Nilai-nilai ini sangat penting untuk menumbuhkan keberagaman dan menghormati perbedaan, sehingga menumbuhkan rasa patriotisme yang dapat memperkuat identitas nasional (Amalina, 2022).

Moderasi agama merupakan salah satu solusi untuk mengelola keragaman agama di Indonesia. Dengan pendekatan yang mempromosikan toleransi, inklusivitas, dan menghindari ekstremisme, moderasi agama dapat menjadi kunci untuk mengurangi potensi konflik sosial. Moderasi beragama dapat menjadi langkah preventif hingga membantu mengurangi ketegangan sosial dan konflik antaragama yang terjadi, serta meningkatkan pemahaman antar agama dan toleransi beragama dalam masyarakat multikultural (Alam, 2018). Konsep moderasi beragama menolak ekstremisme dan radikalisme agama yang seringkali mendorong kekerasan maupun intoleransi terhadap kelompok lain. Dalam praktiknya, moderasi beragama mengajak umat untuk menjadikan agama sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada nilai-nilai universal yang menumbuhkan kedamaian serta keadilan sosial, alih-alih mengeksklusifkan diri. Setiap agama unik dan memiliki kenyamanan dengan *in-group* masing-masing atas dasar kesamaan keyakinan dan tujuan beragama, namun penelitian Priatna (2020) menunjukkan bahwa perkembangan zaman mendewasakan umat beragama untuk memiliki ketergantungan yang positif bagi integrasi bangsa dan negara. Umat beragama akan menjadi lebih bijak merayakan sesama manusia dan berlomba-lomba dalam kebaikan daripada membuat narasi untuk memonopoli surga, sebagaimana sikap moderat dalam beragama juga mencakup kemampuan untuk memahami dan menerima perbedaan pandangan dalam kehidupan sosial-politik (Nasir, 2021). Keterlibatan agama dalam politik juga akan berfungsi sebagai penghalang terhadap kesalahan dan penuntun menuju kebajikan. Inilah mengapa Indonesia teguh menyatakan ketuhanan sebagai butir pertama Pancasila, sehingga tidak hanya implementasi dalam kehidupan bersosial masyarakat, esensi ketuhanan dan agama diperlukan dalam kehidupan berpolitik. Hal ini karena agama tidak akan mentolerir ketidakadilan, membiarkan kebohongan, menyembunyikan kejahatan, berkompromi dengan tirani, menghukum pencuri kecil, dan membiarkan penjahat besar lolos begitu saja (Gunandar et al., 2018). Penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai alat hegemoni politik, tetapi juga sebagai elemen yang mampu mempromosikan harmoni antara berbagai agama, termasuk Islam (Supandi et al., 2024). Moderatisme agama tidak hanya relevan dalam kehidupan nyata, tetapi juga harus menjadi nilai yang kuat tertanam dalam interaksi di ruang virtual (Anwar et al., 2022). Dengan menggunakan media sosial sebagai sarana menyebarkan nilai-nilai moderatisme, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis.

Selain itu, multikulturalisme memainkan peran penting dalam memperkuat identitas nasional Indonesia dengan menciptakan ruang bagi setiap kelompok untuk berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Beragam pendapat tentang multikulturalisme

di sekitar menyesuaikan dengan konteksnya, dan dalam konteks Indonesia, multikulturalisme mencakup pengakuan atas keberagaman suku, agama, bahasa, dan tradisi yang eksis di tanah air. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika sangat dekat dengan konsep ini, di mana perbedaan hadir tidak sebagai penghalang, melainkan kekuatan yang harus dihargai dan dipertahankan. Selain mengakui keberagaman budaya, konsep ini memastikan bahwa setiap kelompok mendapatkan hak yang sama untuk mengungkapkan dan merayakan identitas mereka (Taylor, 1992).

Upaya-upaya yang perlu dilakukan tidak hanya terkonsentrasi pada individu sebagai warga negara, tetapi juga upaya bersama dari pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mengimplementasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari demi menanamkan sikap saling menghargai di kalangan generasi muda. Penting untuk memperkenalkan kebijakan inklusif yang dapat memperkuat pengelolaan keberagaman; yang mengakui hak setiap individu tanpa memandang latar belakang agama, budaya, atau etnis sekalipun. Langkah ini sangat fundamental untuk menjaga keharmonisan sosial di Indonesia. Pemerintah berperan sangat penting dalam menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendorong keberagaman agama dan budaya untuk saling bertoleransi sekaligus memastikan perlindungan bagi kelompok minoritas agar mereka dapat tetap berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial politik (Kymlicka, 1995). Contohnya, dengan mendukung dan mengakui semangat masyarakat untuk bersinergi dalam komunitas seperti Karang Taruna, Kampung Toleransi, Kampung Damai, dan Kampung Pancasila. Selain itu, pemerintah perlu mendorong pendidikan multikultural di semua level pendidikan. Kebijakan pendidikan yang inklusif dan berbasis multikultural dirasa perlu untuk membantu mencegah konflik sosial dengan mempromosikan saling pengertian antar kelompok yang berbeda (Fischer, 2017). Metode kolaborasi yang tepat dapat mendirikan semangat keberagaman yang kokoh untuk mempertahankan identitas nasional sesuai dengan semboyan yang tidak berubah sejak kemerdekaan, Bhinneka Tunggal Ika.

KESIMPULAN

Keberagaman agama dan budaya di Indonesia adalah kekuatan yang perlu dikelola dengan bijaksana untuk memperkuat identitas nasional. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga nilai-nilai budaya sebagai identitas nasional dan memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam sistem pendidikan adalah beberapa cara yang dapat diimplementasikan untuk menanggulangi dan menghindari krisis identitas nasional (Mayanti et al., 2023). Melalui penerapan moderasi agama, pengakuan terhadap multikulturalisme, dan nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat rasa persatuan. Meski tantangan yang hadir tidak kecil, dengan komitmen bersama dari pemerintah, lembaga, hingga masyarakat, Indonesia dapat terus berkembang sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip kebhinekaan. Ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan sebagai rekomendasi.

Pertama, meningkatkan kurikulum pendidikan multikultural di tingkat dasar hingga perguruan tinggi untuk memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, serta pentingnya persatuan dalam perbedaan. Hal ini diperlukan sebagai alat utama untuk membentuk sikap dan perilaku masyarakat. Dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keragaman dan pentingnya keharmonisan, generasi mendatang akan lebih siap untuk menghadapi tantangan sosial dan mengelola perbedaan dengan lebih bijaksana. Pendidikan multikultural yang berbasis pada nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dapat membantu generasi muda memahami dan menghargai perbedaan agama dan budaya yang ada di Indonesia.

Kedua, pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang mendukung keberagaman agama dan budaya dengan memastikan setiap kelompok mendapat perlakuan yang adil dan setara. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas, baik berdasarkan agama maupun budaya, dapat menyebabkan ketegangan sosial. Kebijakan yang inklusif dan berkeadilan akan mengurangi potensi konflik dan memperkuat rasa persatuan dalam masyarakat yang beragam (Khaswara, 2022). Hal ini termasuk memastikan akses yang setara dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik bagi semua kelompok agama dan budaya.

Ketiga, perlu dipertimbangkan untuk menyusun program-program yang mengedepankan moderasi agama di masyarakat, terutama melalui kerjasama antara tokoh agama, pemerintah, dan lembaga pendidikan. Mengingat pesatnya penyebaran paham radikal melalui media sosial, penting untuk memperkuat moderasi agama sebagai landasan dalam menjaga persatuan. Dengan pendekatan moderat, Indonesia dapat meredam ekstrimisme dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan damai (Qolby, 2025). Program ini dapat meliputi pelatihan bagi pemuka agama tentang pentingnya sikap moderat, serta kampanye anti-radikalisasi di media sosial dan media massa.

Keempat, diperlukan upaya untuk memberdayakan budaya lokal dan adat istiadat di setiap daerah, dengan mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga, kementerian, maupun organisasi masyarakat harus mengintensifkan upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang multikultural berdasarkan Pancasila melalui program dan kampanye pendidikan yang melibatkan semua lapisan masyarakat (Billah et al., 2023). Ini termasuk mendukung pelestarian seni, musik, tari, dan bahasa daerah yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Penghargaan budaya lokal yang beragam akan memperkuat rasa kebanggaan terhadap identitas Indonesia yang plural. Ini juga akan memperkaya kehidupan sosial dengan menciptakan ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk berinteraksi secara positif dan membangun kedekatan melalui pemahaman budaya masing-masing (Nasution & Albina, 2024).

Kelima, peningkatan forum-forum dialog antar agama dan budaya di tingkat lokal maupun nasional yang terbuka menjadikan masyarakat lebih memahami perbedaan dan membangun rasa saling menghormati. Hal ini juga dapat mengurangi prasangka dan meningkatkan solidaritas sosial antar kelompok yang berbeda (Nasihin et al., 2023). Dialog antar agama dan budaya dapat difasilitasi oleh lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah dengan tujuan untuk membangun pemahaman, toleransi, dan kerjasama di antara berbagai kelompok.

Keenam, penggunaan dan pemanfaatan media sosial difokuskan sebagai sarana untuk menyebarkan pesan-pesan toleransi, keberagaman, dan persatuan, serta anti-radikal. Mengingat pesatnya perkembangan media sosial sebagai sumber utama informasi, sangat penting untuk menjadikannya sebagai alat dalam memperkuat narasi-narasi positif yang mendukung keharmonisan antar umat beragama dan budaya di Indonesia (Qolby, 2025). Kampanye media sosial yang positif mengenai moderasi agama, kebhinekaan, dan kerukunan dapat menjadi sarana efektif untuk mencapai masyarakat yang lebih inklusif.

Meskipun tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai ini masih ada, upaya kolektif yang melibatkan semua lapisan masyarakat akan memastikan bahwa Indonesia tetap beragam dan bersatu, sebagaimana tercermin dalam motto *Bhinneka Tunggal Ika* (Zahra, 2025). Melalui rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan Indonesia dapat terus memperkuat keberagaman sebagai kekuatan nasional dan menjaga harmoni sosial di tengah tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang majemuk. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan,

Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai negara yang mengedepankan pluralisme dan persatuan sebagai identitas nasional yang berumur panjang.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi yang signifikan dalam penulisan artikel ini. Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Anang Puji Utama dan Dr. Panji Suwarno atas bimbingan, arahan, dan masukan berharga mereka sepanjang proses penulisan artikel ini. Tanpa bimbingan yang sabar dan wawasan yang luas dari mereka, tulisan ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Pertahanan Republik Indonesia atas fasilitas dan akses yang diberikan, yang memungkinkan penelitian ini berjalan lancar. Selain itu, apresiasi juga disampaikan kepada Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional atas penyediaan sumber daya yang diperlukan, termasuk fasilitas perpustakaan, informasi, dan berbagai dukungan administratif.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para penulis artikel ilmiah serta penelitian terdahulu yang tercantum dalam daftar referensi atas wawasan dan kontribusi mereka dalam topik yang diteliti. Tanpa mereka, artikel ilmiah ini tidak akan mencapai hasil yang relevan dan signifikan seperti ini.

Akhirnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarganya atas doa-doa, dukungan moral, dan dorongan yang tak tergoyahkan, yang telah memberikan kekuatan dan inspirasi sepanjang setiap langkah dalam menyelesaikan penelitian ini. Juga kepada semua orang yang tidak dapat disebutkan secara individu atas bantuan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua dukungan ini telah sangat berharga dalam menyelesaikan penulisan artikel ini.

Semoga apa yang telah kami lakukan dapat berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan diterapkan untuk kebaikan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Alam, M. S. (2018). The role of religious moderation in promoting national unity in Indonesia. *Journal of Indonesian Social Studies*, 12(3), 140-152.
- Alfiana, H. N., & Najicha, F. U. (2022). Krisis Identitas Nasional sebagai Tantangan Generasi Muda di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1).
- Amalina, S. N. (2022). Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Indonesia berbasis Pendidikan Multikultural. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 7(4), 1182.
- Anwar, A. S., Leo, K., Ruswandi, U., & Erihadiana, M. (2022). Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Abad 21 melalui Media Sosial. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(8), 3044–3052.
- Aprianti, M., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2022). Kebudayaan Indonesia di Era Globalisasi terhadap Identitas Nasional Indonesia. *EDUMASPUL Jurnal Pendidikan*, 6(1), 996-998.
- Astuti, Y. D. (2023). Profil Pelajar Pancasila Sebagai Upaya Mewujudkan Identitas Nasional Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pendidikan West Science*, 1(2), 133-141.
- Aulia, L. R., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Mengenal Identitas Nasional Indonesia Sebagai Jati Diri Bangsa untuk Menghadapi Tantangan di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8549-8557.
- Billah, H. U., Yunita, M. A., Pratama, M. A., & Kembara, M. D. (2023). Kesadaran Berpancasila

- Dalam Mempertahankan Identitas Nasional. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI)*, 1(2), 113-121.
- Bloom, W. (1990). *Personal Identity, National Identity and International Relations*. Cambridge University Press.
- Bowen GA (2009), "Document Analysis as a Qualitative Research Method". *Qualitative Research Journal*, Vol. 9 No. 2 pp. 27–40, doi: <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Chandra, T. S. K. (2022). *Social Marginalization and Discrimination in Indonesia*. *Jurnal Sosial Politik*, 7(1), 112-125.
- Chusniyah, T. & Pitaloka, A. (2016). *Pengaruh identitas nasional, etnis, dan agama terhadap multikulturalisme dalam menghadapi globalisasi di Indonesia*. Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang. <https://fpsi.um.ac.id/pengaruh-identitas-nasional-etnis-dan-agama-terhadap-multikulturalisme-dalam-menghadapi-globalisasi-di-indonesia/>
- Cilliers, C. R. J. (2019). *Religious Radicalization and the Challenges of Tolerance*. *Journal of Religious Studies*, 33(2), 45-58.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage.
- Fischer, R. (2017). *The Struggle for the Recognition of Difference*. University of Michigan Press.
- Gunandar, J., Wahid, N. A. & Yunus, A. M. (2018). *Islam and The Challenge of Secularism Ideology*. *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences*, 1(3), 110-121.
- Hasan, M. A. K. (2013). MERAJUT KERUKUNAN DALAM KERAGAMAN AGAMA DI INDONESIA (Perspektif Nilai-Nilai Al-Quran). *Jurnal Studi Islam*, 14(1), 66-77.
- Hytten, K. (2017). *Multiculturalism and Education*. University of North Carolina.
- Johansson, T. R. (2024). In defence of multiculturalism – theoretical challenges. *International Review of Sociology*, 34(1), 75–89. <https://doi.org/10.1080/03906701.2022.2045141>
- Kamali, M. H. (2015). *The Middle Path of Moderation in Islam*. Oxford University Press. Diakses dari <https://global.oup.com/academic/product/the-middle-path-of-moderation-in-islam-9780190226831>
- Khaswara, A. (2022). Penyebaran paham ekstremisme di Indonesia. *Urgensi Moderasi Agama di Era Globalisasi* (pp. 7).
- Kiriana, I. N., Dasih, I. G. A. R. P., Widiasih, N. N. S., Supandi, I. N. A., & Sujana, I. W. (2024). *Sociocultural Studies in Harmony Interfaith Based Bali Local Wisdom*. *Journal of Ecohumanism*, 3(8), 11329-11338. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.5737>
- Kurniawati, L. R. P. (2021). *Globalization and Its Impact on Religious and Cultural Identity*. *Jurnal Global Studies*, 22(4), 300-310.
- Kymlicka, W. (1995). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford University Press.
- Mayanti, A., Rishyadi, S., Fitriani, S., & Pratama, Y. (2023). Meningkatkan Kesadaran Identitas Nasional di Era Globalisasi. *Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi*, 1(4).
- Nadhifah, S., Rahmawati, Z., Ramadhan, M. I. H., & Kurniawan, R. (2024). Peran Moderasi Beragama Dalam Pembentukan Akhlak Generasi Alpha Di Era Digital. *Al-Aufa : Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, 6(1).
- Nasihin, A. K. ., Ainol, A., & Khumaidi, A. . (2025). *Implementation of the Concept of Religious Moderation in Islamic Education: Study the Thought of M. Quraish Shihab*. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 14(01), 1–19.

- <https://doi.org/10.58223/syaikhuna.v14i01.6193>
- Nasution, R., & Albina, M. (2024). Pendidikan Multikultural: Membangun Kesatuan Dalam Keanekaragaman. *Scholars: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(2), 164–173. <https://doi.org/10.31959/js.v2i2.2781>
- Nuha, M. U., Fauzia, S. I., Hibatullah, R. H., & Anbiya, B. F. (2024). MEMPERKOKOH IDENTITAS NASIONAL PADA GENERASI MUDA UNTUK MEMBANGUN PESATUAN DAN KESATUAN DI TENGAH GLOBALISASI. *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3). <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1434>
- Pasha, A. (2021). Multiculturalism and national identity in Indonesia. *Jakarta: Penerbit Kebudayaan*.
- Priatna, J. S. C. (2020). Agama dan Solidaritas Sosial: Melihat Keberagaman Agama yang Menyeragamkan Indonesia. https://www.academia.edu/42741542/Agama_dan_Solidaritas_Sosial_Melihat_Keberagaman_Agama_yang_Menyeragamkan_Indonesia
- Rafly, D., Aminah, S., Apriani, I. T., Nugraha, T. A. (2025). Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Masyarakat Multikultural: Upaya Memepertahankan Identitas Bangsa di Era Globalisasi yang Semakin Kompleks. *JHN : Jurnal Hukum Nusantara*, 1(2), 125-132.
- Robinson, F. (2020). *Islam, the State, and Political Authority: Medieval Issues and Modern Concerns*. Cambridge University Press.
- Sabarudin & Arif, M. (2019). KERUKUNAN HIDUP ANTAR UMAT BERAGAMA BERBASIS KEARIFAN LOKAL: Studi Kasus di Kampung Loloan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1).
- Sartori G. (1970). *Concept Misformation in Comparative Politics*. *American Political Science Review*. 1970;64(4):1033-1053. doi: <https://doi.org/10.2307/1958356>
- Schreier, M. (2012). *Qualitative Content Analysis in Practice*. Sage.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Susmayati, A., Veranty, A., Cahyani, L. U., Rambe, S. M., Jahra, S. S., & Safitri, R. (2023). Mempertahankan jati diri identitas nasional di era globalisasi dan digitalisasi. *TIPS: Jurnal Riset, Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(1). <https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/jurnaltips/article/view/2878>
- Supandi, M. D., Sulaksana, M. D., & Saputro, G. B. (2024). PANCASILA DAN ISLAM: MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DI ERA GLOBALISASI. *Jurnal Wawasan Nusantara (JWN)*, 1(1).
- Qolby, H. R., & Kholifah, A. (2025). Urgensi Moderasi Agama di Era Globalisasi. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(5), 1013-1022.
- Taylor, C. (1992). *Multiculturalism and "The Politics of Recognition"*. Princeton University Press.
- Varelaswi, R. S. (2023). Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Meningkatkan Identitas Nasional Melalui P5 di Era Globalisasi. *Proceedings Series of Educational Studies*. <https://doi.org/10.17977/um083.7896>
- Zahra, M. (2025). Membangun Identitas Nasional di Tengah Keragaman : Peran Multikulturalisme dalam Persatuan Indonesia. *JIES (Journal of Islamic Education Studies)*, 3(2).
- Zakirah, T. N. (2021). KEBERAGAMAN SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL: SEBUAH REFLEKSI ATAS SEMBOYAN BHINNEKA TUNGGAL IKA. https://www.academia.edu/44920860/KEBERAGAMAN_SEBAGAI_IDENTITAS_NASIONAL_SEBUAH_REFLEKSI_ATAS_SEMBOYAN_BHINNEKA_TUNGGAL_IKA

Zed, M. (2019). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.